

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah daerah sekarang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berbasis asas otonomi. Dengan adanya sistem desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk mampu bekerja secara efektif dan efisien khususnya dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan begitu sistem desentralisasi akan membantu pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat akan lebih mudah dalam mengkoordinasi dan mengawasi pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel maka dibutuhkan sistem akuntansi yang baik, sehingga setiap daerah mampu mengelola keuangan daerahnya secara efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat berharap baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengelola keuangan sebaik mungkin demi kesejahteraan Bersama. Jika pemerintah daerah tidak dapat mempergunakan anggarannya sesuai dengan yang telah dianggarkan maka hal tersebut mampu menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat akan mempertanyakan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah

“perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja pemerintah yang disusun secara periodik.”

Untuk itu, agar dalam membangun kepercayaan masyarakat, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu memberikan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah terkait program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan laporan kinerja yang relevan, riil, dan transparan kepada masyarakat. Sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah seperti halnya yang tertuang dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan visi dan misi pemerintah serta dalam rangka menciptakan pemerintahan yang *good governance*.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Faktor yang pertama yaitu kompetensi aparatur pemerintah. Menurut Hutapea dan Thoha (2008), kompetensi adalah kemampuan seseorang yang telah berpengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga mampu mengerjakan secara spontan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Aparatur pemerintah yang memiliki *background* Pendidikan sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya akan lebih kapabel dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka dengan adanya aparatur pemerintah yang

berkompeten akan mampu menciptakan pelayanan yang akuntabel dan transparan sehingga akan tercipta akuntabilitas kinerja yang baik.

Faktor kedua yaitu kejelasan sasaran anggaran. Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan jelas agar anggaran tersebut dapat dipahami oleh orang-orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggarannya. Sedangkan menurut mardiasmo (2018) anggaran sektor publik memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Berdasarkan fungsi anggaran, apabila ingin melihat efisiensi dari target kinerja maka anggaran bertindak sebagai alat penilaian kinerja. Di mana anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja pemerintah daerah akan dinilai berdasarkan target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Dengan demikian anggaran dapat dijadikan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Untuk itu perlu dibuat anggaran yang jelas karena kinerja pemerintah dinilai berdasarkan capaian kinerja yang dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan maka akan terlihat apakah anggaran telah terpakai secara efisien. Oleh karena itu, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka suatu instansi pemerintah akan mampu memberikan akuntabilitas yang baik pula karena kejelasan sasaran anggaran dapat membantu dalam pelaksanaan anggaran guna mencapai kinerja sesuai yang telah ditargetkan.

Faktor yang ketiga yaitu sistem pengendalian internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah

“proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keadapan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Ketika pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian yang kuat maka akan tercipta monitoring yang efektif sehingga hal tersebut mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Variabel-variabel independen tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya untuk menguji pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada penelitian Agustin (2018) di Kota Yogyakarta menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian pada penelitian Ashari (2020) di Kota Palopo membuktikan bahwa pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya pada penelitian Samosir (2020) di Provinsi Sumatera Utara menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, sistem pelaporan, anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya pada penelitian Tambuk (2020) di Kabupaten Mangarai Timur membuktikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan

kinerja, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian penelitian Safitri (2020) di Kabupaten Kebumen menyimpulkan bahwa penerapan sistem pelaporan, kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya penelitian Bernadine (2018) di Kabupaten Klaten menyimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran, dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali variabel-variabel independen yaitu kompetensi aparatur pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian internal yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu untuk menguji kembali variabel-variabel independen tersebut. Peneliti memilih variabel-variabel tersebut karena memiliki kesesuaian dengan masalah yang terjadi pada instansi pemerintah Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2019 mendapatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (Kumolo, 2020), berdasarkan hasil evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Magelang, masih terdapat 4 sasaran strategis yang pengalokasian dananya belum tepat sasaran yang menyebabkan belum efisiennya penggunaan anggaran yang telah

dianggarkan. Selain itu sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Kota Magelang serta monitoring dan evaluasi kinerja masih perlu ditingkatkan agar target kinerja yang sudah direncanakan dapat tercapai.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, pada penelitian ini peneliti menggunakan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Magelang?
2. Apakah penerapan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Magelang?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Magelang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh variabel independen yaitu kompetensi aparatur pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian internal terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktik.

### 1. Manfaat Teori

Penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan faktor independen yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti kompetensi aparatur pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian internal.

### 2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Magelang agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang digunakan sebagai tolok ukur untuk meraih nilai SAKIP AA serta untuk meningkatkan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.